

POLICY BRIEF

MENGURAI BENANG KUSUT PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI JAWA TIMUR

EXECUTIVE SUMMARY

Kemiskinan selalu menjadi permasalahan klasik pada setiap era pemerintahan di Indonesia sehingga muncul komitmen untuk menghilangkan kemiskinan pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022. Kebijakan ini menjadi perhatian pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah terutama Jawa Timur yang menjadi salah satu *pilot project* dalam penyelesaian kemiskinan ekstrem. Kendala yang masih terjadi di lapangan adalah basis data yang digunakan masih terkesan egosektoral. Selain itu bantuan sosial yang dicanangkan untuk masyarakat miskin juga masih belum tepat sasaran. Solusi pengurangan kemiskinan ekstrem harus segera dilakukan seperti mempercepat satu data kemiskinan, memfokuskan pada program pemberdayaan yang berkelanjutan serta menciptakan model kewirausahaan bagi masyarakat rentan miskin sebagai upaya pencegahan.

Policy Brief ini ditujukan kepada:

- 1. Gubernur Jawa Timur,**
- 2. Wakil Gubernur Jawa Timur,**
- 3. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

LATAR BELAKANG

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan seolah terus berkelanjutan dan belum menemukan penanganan yang tepat. Berbagai macam program kemiskinan yang dirancang sedemikian rupa ternyata masih meninggalkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 9,54%. Sebanyak 265 Kabupaten/Kota (51.56 Persen) memiliki persentase penduduk miskin di atas angka nasional. Tahun 2022, kemiskinan lebih menasar masyarakat yang sangat miskin atau kemiskinan ekstrem. Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan program dari pemerintah pusat dimana pada Tahap I tahun 2021 ini ada 7 provinsi yang ditunjuk menjadi *pilot project* yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Keluarnya Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan hingga tahun 2024. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kemiskinan Ekstrem menurut Bank Dunia adalah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,91 dolar AS per hari atau kurang dari Rp 30 ribu per hari dengan asumsi kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 14.130. Pengentasan kemiskinan ekstrem juga menjadi program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi *pilot project* atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelima kabupaten tersebut yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kemiskinan ekstrem Jatim tahun 2021 mencapai angka 4,4% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20% dari jumlah penduduk miskin Jatim.

Pada dasarnya Pemprov Jatim telah melakukan intervensi melalui beberapa program pengentasan kemiskinan. Pemprov Jatim mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).

ANALISIS PERMASALAHAN

Cukup tingginya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur merupakan permasalahan yang disebabkan oleh berbagai macam indikator. Peningkatan kemiskinan ekstrem salah satunya disumbang dengan munculnya Pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan ekonomi masyarakat, UMKM, dan usaha kecil lainnya. Setelah 3 (tiga) tahun pasca pandemi covid-19 WHO melalui Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mencabut status *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau darurat kesehatan global untuk Covid-19 pada Jumat (5/5/2023). Berangsurnya kondisi pandemi ke situasi normal ini juga tidak lantas dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Sulitnya memecahkan permasalahan kemiskinan ekstrem juga karena kendala dari pemanfaatan data yang tumpang tindih. Beberapa kementerian mengeluarkan data sendiri terkait data kemiskinan di Indonesia, seperti Kementerian Sosial menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Kemenko PMK menggunakan data P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta BKKBN menggunakan data PK21 (Pendataan Keluarga 2021). Berbagai data yang dikeluarkan oleh kementerian ini membawa kebingungan bagi daerah. Sementara masing-masing Kabupaten/Kota juga memiliki formula sendiri dalam mendata masyarakat miskin di daerahnya dengan melakukan verifikasi dan validasi pada level kelurahan. Kondisi ini terkadang membuat pemerintah daerah sulit mengintervensi karena adanya kriteria-kriteria yang berbeda untuk masyarakat miskin.

ANALISIS PERMASALAHAN (Lanjutan)

Kendala lain dari yang dihadapi yaitu banyaknya bantuan sosial yang kurang merata dan tidak tepat sasaran. Bantuan sosial yang diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada kenyataannya belum dapat menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Bantuan secara finansial terkadang hanya memberikan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan kurang diperuntukkan bagi hal-hal produktif. Sementara bantuan yang bersifat pemberdayaan masih terkendala dalam hal keberlanjutan dan monitoring sehingga banyak program yang berhenti dan secara otomatis juga menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kendala yang tak kalah menghambat adalah orientasi program yang cenderung hanya bersifat amal-karitatif, yang dalam jangka menengah dan panjang justru mematikan potensi masyarakat miskin untuk keluar dari tekanan kemiskinan secara mandiri. Pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin memang memperkuat daya tahan keluarga miskin menghadapi kebutuhan hidup selama masa krisis. Namun demikian efek samping dari bentuk bantuan seperti ini seringkali justru berpotensi melahirkan ketergantungan."

Kebutuhan akan satu data kemiskinan diharapkan dapat terwujud dari adanya survey terbaru dari BPS yaitu survei registrasi sosial ekonomi. Data ini diharapkan menjadi satu-satunya sumber informasi dari data kemiskinan sehingga permasalahan basis data dapat teratasi. Kemiskinan dapat dipahami sebagai cerminan ketidakmampuan individu, rumah tangga, keluarga, atau komunitas untuk mencapai standar hidup minimum yang diterima secara sosial, kebutuhan konsumsi dasar, atau pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mokomane, 2012). Namun pada dasarnya ukuran kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan dengan masalah finansial saja. Pendidikan yang rendah, budaya, lingkungan sosial, akses infrastruktur serta ketidakmampuan individu merupakan beberapa alasan kemiskinan yang sangat sulit diselesaikan karena melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Beberapa penelitian telah menghasilkan temuan penting terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem salah satunya melalui pengembangan kewirausahaan (Sutter C, et. Al, 2019) yang dapat menjadi solusi dalam mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem terutama di Jawa Timur



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Adapun beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu

1. MEMPERCEPAT SATU DATA KEMISKINAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengintegrasikan satu data kemiskinan melalui rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk mengkolaborasikan dan menyepakati satu data kemiskinan yang digunakan sebagai basis data untuk menyusun kebijakan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

2. LEBIH BANYAK MENEKANKAN PADA BANTUAN PEMBERDAYAAN BERDASARKAN POTENSI EKONOMI LOKAL

Pemprov Jatim dapat melakukan pemetaan potensi lokal yang ada pada masing-masing daerah sehingga dapat dikembangkan potensi lokal desa oleh masyarakat setempat. Potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga dapat membangun kapasitas pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya dana desa selain untuk pembangunan infrastruktur dapat juga difokuskan pada program - program pemberdayaan masyarakat miskin.

“Program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan Pokmas untuk memperkuat posisi tawar dan perbaikan margin keuntungan yang diperoleh masyarakat miskin – tanpa harus menumbuhkan ketergantungan dan menghilangkan mekanisme self-help mereka.”

3. PENGEMBANGAN MODEL KEWIRAUSAHAAN DI MASYARAKAT

Tidak hanya program pemberdayaan namun program lain seperti pengembangan kewirausahaan untuk masyarakat miskin juga dapat dilakukan. Pemprov Jatim dapat memperluas akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin yang telah memiliki usaha rintisan atau masyarakat rentan miskin untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dengan bantuan fasilitasi usaha mikro. Konsep ini diperlukan sebagai upaya pencegahan agar kemiskinan tidak semakin meningkat.


“Salah satu bentuk program pengembangan kewirausahaan masyarakat adalah program bantuan modal usaha ganda yang difokuskan pada pengembangan diversifikasi usaha dan pengembangan usaha baru di kalangan keluarga miskin dalam rangka memperkuat penyangga ekonomi keluarga miskin.”



REKOMENDASI

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah diuraikan tersebut maka upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim dapat dielaborasikan menjadi program kegiatan di masa mendatang. Komitmen pemerintah daerah juga perlu diperkuat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan basis data kemiskinan yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan salah sasaran. Kemudian mengembangkan model pemberdayaan dan model kewirausahaan dapat menjadi alternatif untuk menyusun kebijakan yang lebih teknis yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, serta kelurahan/desa.

REFERENSI

- Mokomane, Z. (2012). Types of good practices focusing on family poverty reduction and social exclusion. Human Sciences Research Council of South Africa, New York, 15-17 May 2012
- Sutter, C., Bruton, G. D., & Chen, J. (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty: A review and future research directions. *Journal of business venturing*, 34(1), 197-214.
- 



DITULIS OLEH:

PUJI MARYONO, ROBAJANTO, SRI WAHYUNINGSIH, VINDA TYAS RESTIANINGATI

SEKRETARIAT:

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

ALAMAT:

JL. GAYUNG KEBONSARI NO.56 SURABAYA

TLP. 8290738 – 8290719 FAX. 8290719

WEBSITE : WWW.BALITBANG.JATIMPROV.GO.ID

EMAIL : KEMAS.BALITBANGPROVJATIM@GMAIL.COM